



**KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)**

---

- Rapat ke : 12 (dua belas)  
Tahun Sidang : 2016-2017  
Masa Persidangan : I  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Sekretaris Jenderal Komunikasi dan Informatika, dan Direktur Utama LPP TVRI/ke-1  
Hari, Tanggal : Senin, 5 September 2016  
Pukul : 10.00 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : MVH  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP.,M.Si.  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Acara : Penjelasan Dirjen Anggaran Kemenkeu, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Sekjen Kemenlu, Sekjen Kominfo dan Dirut LPP TVRI mengenai :  
1. Kemenlu:  
a. Penghapusan asset-aset RI di luar negeri  
b. Pengadaan kantor perwakilan, wisma duta, sarana dan prasarana RI di luar negeri  
c. Tunjangan Diplomat di luar negeri  
2. Kominfo: pemanfaatan dana USO (*Universal Service Obligation*)  
3. LPP TVRI: Hutang LPP TVRI  
Hadir : 1. .... orang dari 52 Anggota Komisi I DPR RI  
2. Dirjen Anggaran Kemenkeu, Askolani  
3. Dirjen Kekayaan Negara, Sonny Loho  
4. Sekjen Kemlu, Drs. Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo  
5. Sekjen Kemkominfo, Dra. Farida Dwi Cahyarini, MM  
6. Dirut LPP TVRI, Iskandar Achmad  
Beserta jajarannya

## I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. RDP Komisi I DPR RI dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Sekjen Kemenlu, Sekjen Kominfo dan Dirut LPP TVRI, pada hari Senin, tanggal 5 September 2016 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI

## II. KESIMPULAN :

1. Sehubungan dengan penjelasan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengenai penghapusan aset-aset RI di luar negeri; pengadaan Kantor Perwakilan, Wisma Duta, Sarana dan Prasarana RI di Luar Negeri; dan tunjangan Diplomat di luar negeri, Komisi I DPR RI meminta Kemlu untuk:
  - a. menyusun mekanisme komunikasi yang efektif bersama Kemkeu untuk memperjelas informasi kebijakan penghapusan aset di Perwakilan RI;
  - b. menyampaikan data yang komprehensif mengenai status kepemilikan gedung-gedung perwakilan dan wisma Rldi luar negeri; dan
  - c. merumuskan kebijakan dasar dan *roadmap* pembelian kantor perwakilan RI di luar negeri.
2. Sehubungan dengan pengelolaan dana *Universal Service Obligation* (USO) melalui Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk:
  - a. melakukan pengelolaan dana USO secara lebih efektif sehingga pemanfaatan dana USO dapat lebih optimal dengan merujuk kepada redesain USO, target yang telah ditetapkan, dan kepentingan masyarakat. Untuk itu, dalam konteks fungsi pengawasan dan fungsi anggaran, Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk berkoordinasi dengan Komisi I DPR RI terkait penggunaan dana USO tersebut.
  - b. memprioritaskan penyelesaian sengketa 93 kontrak program PLIK MPLIK yang didanai USO, dengan merujuk nilai putusan yang telah ditetapkan oleh BANI dan hasil musyawarah.
3. Komisi I DPR RI mendesak LPP TVRI untuk melakukan pembayaran utang sebesar Rp124.882.461.781,46 (*seratus dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma empat puluh enam rupiah*) secara bertahap dengan mengalokasikannya disetiap tahun anggaran berjalan. Disamping itu, Komisi I DPR RI meminta agar pengelolaan piutang dapat dilakukan secara maksimal. Terkait dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI mendorong LPP TVRI untuk melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB.

Jakarta, 5 September 2016  
**KETUA RAPAT,**

TTD

**MEUTYA VIADA HAFID**  
A-235